

**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance*
(Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi
Lampung)**

Skripsi

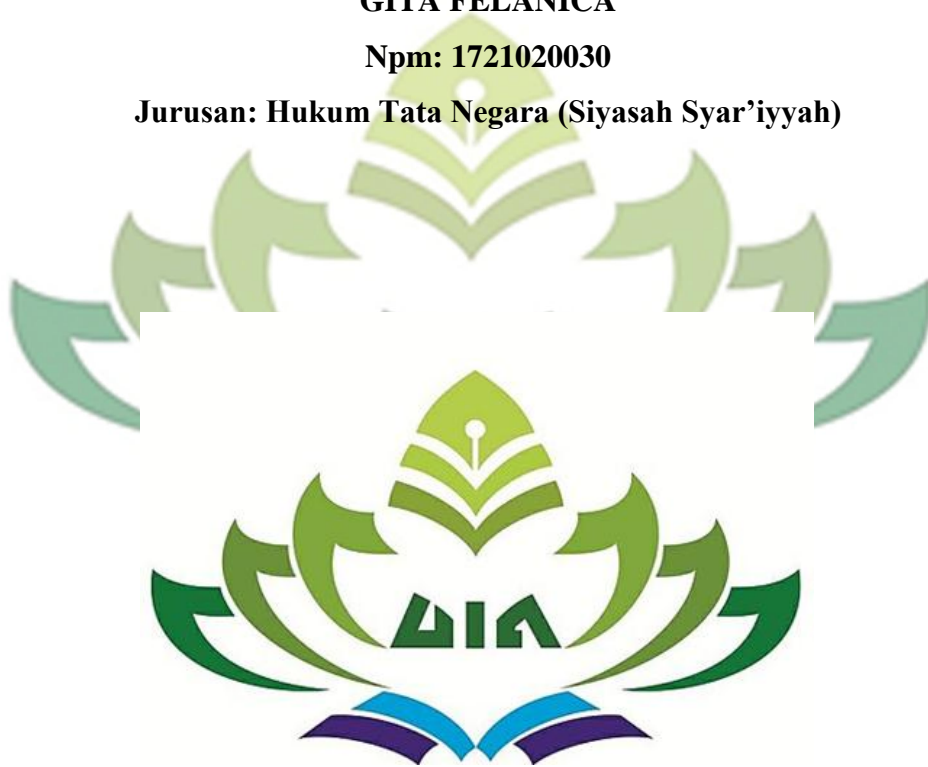
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah

Oleh :

GITA FELANICA

Npm: 1721020030

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance
(Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)**

Skripsi

**Duajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna memperoleh
Sarjana hukum (S.H) dalam ilmu Syariah**

Oleh:

Gita Felanica

Npm: 1721020030

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Pembimbing I : Prof. Dr. H Moh Mukri. M.Ag

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021 M**

ABSTRAK

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung). Peran pemerintahan sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor pembangunan negara, pemerintahan merupakan harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup masyarakat yang berdaulat dan sejahtera melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Good Governance adalah salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Secara singkat good governance adalah tata Kelola pemerintahan yang bersih (good clean and governance). Pemerintah yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa (public and service). Adapun prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, berbasis hukum, transparan, responsive, orientasi consensus, kesetaraan, efektifitas, dan efisien serta akuntabilitas. Bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan prinsip-prinsip good governance sudah terlaksana dengan baik atau sebaliknya.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode lapangan atau (field risech) yaitu data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara langsung dilapangan. Teknik analisa data yaitu kesimpulan yang diperoleh menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa wawancara secara langsung yang kemudian diuraikan dan tertuju pada landasan teori.

Berdasarkan hasil kesimpulan pembahasan dan penelitian dapat diperoleh bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena berbagai faktor diantaranya, belum banyaknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, dan bagaimana pemerintah menjalankan prinsip-prinsip good governance, sehingga menghambat jalannya pelaksanaan prinsip-prinsip yang lainnya. Faktor berikutnya. Menurut pandangan Fiqh Siyasah bahwa Prinsip-Prinsip Good Governance pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia merupakan salah satu yang wajib dijalankan oleh seorang pemimpin kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa membuat masyarakatnya sejahtera dan berbuat adil karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance** (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia APDESI Provinsi Lampung)
Nama : **Gita Felanica**
Npm : **1721020030**
Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 8 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
NIP. 195904161987031002

Dr. Gandhi Liyorba Indra S. Ag. M. Ag.
NIP. 197504282007101003

Ketua Jurusan

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran APDESI Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Study (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Provinsi Lampung" oleh: Gita Felanica, NPM: 1721020030, Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Syari'ah pada Hari: Kamis/ 08 Juni 2021.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki M.Si.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji I : Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210211993031002

MOTTO

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”
(Qs. An-Nisa 58).*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin Dengan menyebut nama Allah SWT dan Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya. Saya Persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Mama Tercinta Winarti dan Ayah Tersayang Karno yang telah mendidik saya sedari kecil hingga menjadi dewasa, dengan kasih sayang dan cinta, dan selalu mendoakan serta selalu sabar dalam memberikakan dukungan, memberikan segala perhatian kepada saya agar skripsi ini cepat selesai dan menuntaskan studi ku di UIN Raden Intan Lampung. Segala perjuangan saya hingga dititik ini adalah doa-doa mama dan ayah yang dikabulkan oleh Allah mama dan ayah adalah orangtua paling berharga dalam hidup. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna Semoga Allah memberikan Kesehatan dan nikmat kepada mama dan ayah.
2. Untuk Nenek Juwariyah, Sepupu-Sepupu saya Kak Devina, Kak Ressa, Kak Ferry dan Adik-Adik saya, Andanna, Velda, Arvin, Fiona, Fioni, Fahira, Naraya, dan Keyla terimakasih sudah selalu mendukung saya di segala keadaanku, selalu memebrikasn motifasi agar skripsi ini segera selesai. Saya ucapakan banyak terimakasih semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan kenikmatan.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Priesti, Febriyani, Mauli, Rani, Terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, dan juga menjadi pundak saat mengis. Fadlan, Pipit, Alma, Norma, Susi, dan teman-teman kelas F siyasah Angkatan 17.

Saya ucapkan terimakasih karena telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Terimakasih kepada Amamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Gita Felanica lahir di Desa Bogatama, Kec. Penwartama Kab. Tulang Bawang tanggal 04 Maret 1999. Alamat penulis Desa Sidoharjo kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang. Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Karno dan Ibu Winarti.

1. Pendidikan yang ditempuh pertama kali pada SDN 02 Sidoharjo kec. Penwartama kab. Tulang Bawang lulus pada tahun 2011.
2. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP N 01 Penwartama lulus pada tahun 2014.
3. Melanjutkan Pendidikan pada jenjang selanjutnya SMA N 01 Penawartama dan lulus pada tahun 2017.
4. Setelah lulus dari SMA peneliti terdaftar sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL) pada Fakultas Syariah jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Ilmu pengetahuan kekuatan dan pertunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)”**.

Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari salah satu tugas akhir. Fakultas Syariah Program Studi Siyasah (Hukum Tatanegara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya akan adanya kekuarangan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung dan selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Bapak Hevin Yoki Pradikta M.H.I selaku sekretaris jurusan Siyasah Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Gandhi Liyorba Indra M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Bapak Buyung Suhardi yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepala Desa Sidoharjo Bapak Iwan Santoso yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Bandar Lampung, 2021

Penulis

Gita Felanica

Npm: 1721020030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	12
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian	13
H. Kajian Penelitian Terdahulu	18
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23

A. Fiqh Siyasah	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah	28
2. Ruang Lingkup Siyasah.....	30
3. Siyasah Dusturiyah	33
B. Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	33
1. Sejarah APDESI	33
2. Pengertian APDESI	35
3. Dasar Hukum APDESI.....	37
C. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	38
1. Pengertian Good Governance	38
2. Sejarah Konsep Good Governance	41
3. Prinsip-Prinsip Good Governance	44
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum APDESI	50
1. Asas dan Tujuan APDESI	51
2. Sifat dan Fungsi APDESI	52
3. Visi dan Misi APDESI	53
4. Struktur Organisasi APDESI.....	53
5. Tugas dan Wewenang APDESI.....	54
B. Data Wawancara.....	57
1. Sumber Data dan Wawancara dari Ketua APDESI.....	57

2. Sumber Data dan Wawancara dari Kepala Desa	58
3. Sumber Data dan Wawancara dari Masyarakat.....	59
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	63
A. Analisis Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> pada APDESI	63
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> pada APDESI	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum dijelaskan lebih lanjut, maka perlu adanya sebuah kejelasan mengenai judul proposal skripsi ini dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Lampung)”.

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah sebuah pendapat atau sebuah kegiatan pengumpulan data atau penyajian data yang dikelola secara sistematis dan objektif yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada¹.

2. Fiqh

Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh juga disebut dengan Hukum Islam².

¹ <https://kbbi.web.id/tinjau.html> (diakses pada tanggal 23 agustus 2020 pukul 15:09 WIB).

² Muhammad Iqbal,. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam*. (Jakarta: Prenada Media Group.2014), 3.

3. Siyasah

Siyasah berarti pemerintahan yang berdasarkan Syariah. Siyasah dalam ilmu yang berarti suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan atau kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa, dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat³.

4. Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman unruk berpikir atau bertindak⁴.

5. Good Governance

Secara ringkas *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai tata Kelola pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*), menjadi perhatian karena peran pemerintah (*institution*) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara⁵.

6. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat menjadi (APDESI) adalah organisasi profesi dan berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri,

³ A.Djazuli, Fiqh Siyasah ,edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2009) , 29.

⁴ <https://id.m.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 23 agustus 2020 pukul: 18:28 WIB)

⁵ Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam(Pendekatan Ushul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)*, (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol 6, No 1, Juni 2015),26.

atas dasar kesamaan ikatan profesi di bidang pemerintah desa serta pembangunan pedesaan⁶ selanjutnya disingkat menjadi APDESI.

Dengan demikian maksud dari proposal skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyah Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)” adalah menyelidiki bagaimana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan menganalisa menurut fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Adanya beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam judul proposal skripsi ini, antara lain:

1. Alasan Objektif

Good Governance atau pemerintahan yang baik, sangat penting bagi para penyelenggara pemerintahan, untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, khususnya dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan pemerintahan. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengkaji bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip-prinsip *good governance* dalam asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia.

2. Alasan Subjektif

a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan terhadap prinsip-prinsip *good governance*, sebagai

⁶ Proposal Permohonan Bantuan Operasional Organisasi DPC APDESI (Kabupaten Kuningan :Tahun Anggaran 2019),4.

bahan pembahasan proposal skripsi ini. Bagi ilmu penegetahuan Fakultas Syariah pada umumnya dan penulis.

- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang prinsip-prinsip *good governance* yang dapat diterapkan di berbagai penelitian, serta menjadi salah satu sayarat penulis untuk mendapat gelar sarjana hukum.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap warganegara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau secara Bersama-sama. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warganegara. Pada sisi lain, pemerintahan terjauhkan dari pengalaman etika pemerintahan⁷. Suatu pemerintahan tanpa masyarakat adalah sebuah kekacauan massal. Didalam masyarakat manusia beradab, diperlukan lebih banyak peraturan. Diperlakukan juga lebih banyak upaya dan kekuatan untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan ditaati.

Perjalanan hidup bangsa Indonesia sudah berjalan selama 75 tahun. Kurun waktu yang tidak lama, dan tidak bisa di katakana sebagai suatu jenjang waktu untuk mencapai kesempurnaan taraf hidup masyarakat Indonesia, yang taraf hidupnya lebih Makmur dan sejahtera, sebagaimana diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara harus

⁷ Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam(Pendekatan Ushul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)*, (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol 6, No 1, Juni 2015),26.(Diakses pada tanggal 3 September 2020).

mewujudkan masyarakat yang adil Makmur dan sejahtera⁸. Untuk mewujudkannya perlu adanya peran dari pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹.

Indonesia sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alamnya, seyogyanya taraf hidup rakyat lebih Makmur dan sejahtera. Ironinya saat ini Indonesia masih termasuk dalam kategori negara yang sedang berkembang (*under development country*)¹⁰. Harapan yang ingin diwujudkan oleh setiap warganegara melalui proses pemerintahan adalah beralngsungnya kehidupan secara wajar, dalam semua bidang dan ukuran kehidupan mereka. Pemerintahan pertama-tama diharapkan dapat membentuk kesepakatan warganegara tentang bingkai dalam proses kolektif warga negara. Dengan demikian kebutuhan akan kehidupan secara wajar masyarakat sebagai kewajiban dari pemerintah¹¹.

Pelaksanaan otonomi daerah di indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, dimana pengembangan suatu ddaerah dapat di sesuaikan oleh pemerintah daerah dengan

⁸ Rizald Max Rompas, Tomo HS, dan Dasril Munir, *Kreasi Good Governance Suatu Eksiterik Mutlak*, (Jakarta Pusat: Sekertariat Dewan Kelautan Indonesia, 2010), 1.

⁹ Nuryadi & Tolib, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Klaten: Intan Pariwara, Edisi Revisi 2017), 126

¹⁰ Rizald Max Rompas, Tomo HS, dan Dasril Munir, *Kreasi Good Governance Suatu Eksiterik Mutlak*, (Jakarta Pusat: Sekertariat Dewan Kelautan Indonesia, 2010), 2.

¹¹ Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam(Pendekatan Ushul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)*, (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Vol 6, No 1, Juni 2015), 26. Diakses pada tanggal 5 September 2020.

memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan, dan evaluasi pada semua aspek pemerintah.¹² Di dalam Al-Quran terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel (*al-amanah*), keadilan (*al-ʿadalah*), persamaan (*al-musawah*), control (*amr bi al-maʿaruf nahy al-munkar*). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum Barat salah satunya Indonesia¹³.

Kemudian tercantum dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya :

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*¹⁴. (Q.S Al-Mumtahanah:8)

¹² Nuryadi & Tolib, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Klaten: Intan Pariwara, Edisi Revisi 2017),139.

¹³ Yudi Latif dkk, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005),89.

¹⁴ *Al-Quran Terjemahan*, Departemen Agama RI, (CV Darus Sunnah, Bandung) 913.

Ayat diatas termasuk ayat yang paling komprehensif dalam Al-Quran, karena dalam ayat ini digambarkan bahwa manusia harus berbuat adil di dunia yang berlandaskan keadilan, kebaikan dan menjauhkan dari segala perbuatan zalim, dan sifat arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasihat ilahi yang dijaga oleh semua umat manusia. Untuk mewujudkan tujuan harapan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *Good Governance*. *Good Governance* selalu menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar keilmuan, tetapi juga pakar politik, pakar hukum, manajemen pemerintahan, tata negara, bahkan hukum islam.

Secara ringkas *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai Tata Kelola pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*), menjadi perhatian karena peran pemerintah (*institution*) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Reformasi yang diharapkan langkan awal untuk membangun *good governance* pemerintah yang bersih dan transparan, dan akuntabel masih banyak yang mengalami hambatan besar. Praktik korupsi,kolusi dan nepotisme masih banyak terjadi dan masih sangat kental. Secara historis agama juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan *civil society* untuk mewujudkan (Tata Kelola) pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁵.

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai

¹⁵ Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam(Pendekatan Ushul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)*, (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :Vol 6, No 1, Juni 2015),26.

kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, di perlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintahan daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*). Prinsip-prinsip, partisipasi (*participation*), berbasis hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), responsif (*responsiveness*), orientasi konsensus (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisien (*effectiveness and efficiency*), dan akuntabilitas (*accountability*)¹⁶.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termuat pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a)Kepastian Hukum, (b)Kemanfaatan (c)Ketidak Berpihakan, (d) Kecermatan (e)Tidak Menyalahgunakan Wewenang, (f)Keterbukaan, (g) Kepentingan Umum dan, (h)Pelayanan yang Baik. Sejalan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 58 huruf (a) kepastian hukum, (b)tertib penyelenggara negara, (c) kepentingan umum, (d)Keterbukaan, (e)proposionalitas, (f)profesionalitas, (g) akuntabilitas, (h)efisiensi, (i)efektifitas, (j)keadilan.

¹⁶ A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), 211-214.

Dalam hukum islam *Good Governance* merupakan Gerakan Ijtihad. Persoalan *Good Governance* tidak terlepas dari siyasah syar'iyah karena sama-sama mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Persamaan siyasah dan *good governance* yaitu pengaturan pengadilan dan pelaksanaan dalam suatu wilayah dalam negara. Siyasah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat serta hukum-hukum yang mengatur jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemaslahatan masyarakat¹⁷.

Maka dengan demikian untuk dapat terlaksanakan dengan efektif, salah satunya perlu dilaksanakan dan di terapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti aparatur pemerintahan punya kompetensi di bidang tugas masing-masing, adanya sikap transparansi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tanggapan dan peduli dengan kebutuhan masyarakat yang intinya sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Merealisasikan pemerintahan yang baik bukan pekerjaan mudah tetapi butuh proses. Untuk mewujudkan *good governance* di perlukan manajemen yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Gagasan untuk mewujudkan *good governance* dapat tercapai apabila kembali kepada nilai-nilai Islam. Keberadaan hukum islam merupakan solusi atau setidaknya merupakan jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara.

¹⁷ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta,:Pramedia Group; 2004), 5

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia adalah organisasi profesi dan berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan ikatan profesi di bidang pemerintah desa serta pembangunan pedesaan¹⁸. Keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah akan sangat menentukan perjalanan dan nasib bangsa dan negara di masa mendatang. Untuk melaksanakan otonomi daerah diperlukan adanya suatu wadah Kerjasama pemerintah desa yang dinamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pembentukan APDESI merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pelaksanaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan misinya, Asosiasi bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif terhadap pelaksanaan Kerjasama antara pemerintah desa untuk memanfaatkan peluang yang bersekala nasional, regional dan global guna kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat desa sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan tujuan tersebut APDESI berkewajiban dan berhak menetapkan perwakilannya yang duduk memperjuangkan kepentingan desa.¹⁹

D. Fokus Penelitian

1. Jenis Penulisan

¹⁸ *Proposal Permohonan Bantuan Operasional Organisasi DPC APDESI (Kabupaten Kuningan :Tahun Anggaran 2019)*, 4.

¹⁹ *Anggaran Dasar Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)* 1.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penulisan kualitatif yang menggunakan prosedur deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang penulis teliti. Penulis menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dijalankan pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.

2. Fokus Penelitian

Penulisan ini memfokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dijalankan dengan benar atau sebaliknya demi kepentingan masyarakat.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran APDESI dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip-prinsip *Good Governance* pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Ingin mengetahui penerapan fiqh siyasah terhadap prinsip-prinsip *good governance* pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Lampung.
- b. Ingin mengetahui tinjauan fiqh siyasah prinsip-prinsip *good governance* di Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Provinsi Lampung.

2. Kegunaan penelitian

- a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan terhadap prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai bahan pembahsana proposal skripsi ini. Bagi ilmu pengetahuan Fakultas Syariah pada umumnya dan pada penulis.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini dapat memebrikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang prinsip-prinsip good governance yang dapat di terapkan di berbagai pemerintahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Riseach*) yaitu data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau wawancara langsung di lapangan. Pengumpulan data juga melalui beberapa tulisan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Dan disajikan dalam bentuk tulisan ini, yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Prinsi-Prinsip *Good Governance* (Studi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Lampung).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala pada saat penelitian dilakukan²⁰. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan

²⁰Suahrismi Ari Kunto, *Management Penelitian*.,(Jakarta:PT. Rieneka Cipta, (cetakan kedua), 1993,) 309.

mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian di simpulkan mendeskripsikan²¹.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari penelitian terhadap objek yang di teliti dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber. Metode wawancara yaitu metode yang menjelaskan fakta dengan cara pengajuan pertanyaan secara langsung kepada objek yang akan di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang jenisnya dilakukan dengan penelusuri berbagai sumber yang berhubungan dengan apa yang sedang di teliti berupa buku-buku, jurnal, artikel serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

4. Pengumpulan Data

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan mengolah dan mencatat secara sistematis kejadian atau fenomena yang sedang diteliti²². Observasi dilakukan Kantor Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.

²¹Zainudin Ali,. *Metode Penelitian Hukum*..(Jakarta: Grafika,(cetakan ke tiga), 2011) 105.

²²Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Pembahasan Kualitatif dalam Pendidikan*.. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996), 225.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tipe corder*)²³.

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan *interview* pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya²⁴.

a) Populasi Sampel

Populasi Sampel adalah keseluruhan objek penelitian.²⁵

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal Bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah salah satu desa

²³ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (cetakan kelima), 2002), 69.

²⁴ Suharsini Arikunto., *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, (Jakarta: PT Rineken Cipta, 2014), 274.

²⁵ Sukardi, *Metode Penelitian Suatu Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 53.

yang menjadi anggota dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁶ Yang menjadi sampel didalam penelitian ini adalah Kepala Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia 1 orang, Kepala Desa 1 Orang, serta 10 masyarakat dan semua berjumlah 12 orang.

b) Pengelolaan Data

a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Jadi, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di Pustaka dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Pendataan data, adalah memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti²⁷.

c. Rekonstruksi data, adalah Menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian²⁸.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung:Alfabeta cv, (cetakan ke 15), 2010), 116.

²⁷Burhan Ashhofa, *Metode Peneletian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta 2013), 122-123.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Mtodologi Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006 h. 107.

c) Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data diperlukan agar peneliti bisa mengembangkan kategori dan sebagai perbandingan yang kontras untuk menemukan suatu yang mendasar dan memberi gambaran apa adanya.²⁹

Setelah data terkumpul Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang kita peroleh. Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang kemudian diuraikan dan tertuju pada landasan teori. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian penelitian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun tesis yang masih berhubungan dengan relevansinya dengan penelitian ini.

Pertama. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizky Ridwan (2017) yang berjudul” Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan

²⁹Sedarmayanti, Syaiful Hidayat, *Metodologi penelitian*, (Bandung:Mandar Maju, 2002), 8.

Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam perencanaan jangka menengah daerah kota Makassar (2014-2019) dan hambatan dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu kepustakaan (literature study) dan studi lapangan (field study). Penelitian ini bersifat deskriptif. Datanya kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari keempat prinsip good governance yang diteliti, prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penerapannya telah dijalankan sesuai indikator yang telah ditentukan. Berbeda dengan prinsip partisipasi dan penerapannya masih memiliki hambatan dalam penerapannya. Prinsip yang dilakukan Bappeda kota Makassar, partisipasi masyarakat hanya berlaku di musrembang saja. Bagitupula dengan prinsip transparansi dalam penerapannya masih memiliki kendala dimana dalam penetapan APBD dikarenakan yang hanya pemerintah yang terlibat dan anggota DPR saja tetapi tidak melibatkan masyarakat dalam penetapannya.

Kemudian, Skripsi yang ditulis oleh Putri Wahyu Febriani (2016) yang berjudul " Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Pajak dan Bangunan di Desa Pagarejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016" pelayanan publik yang berkualitas menjadi faktor penting bagi penyelenggaraan pajak seiring dengan semakin pesatnya kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good*

governance dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Pagerejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo tahun 2016, dan Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Pagerejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo tahun 2016. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Pagerejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo secara umum mengacu kepada prinsip-prinsip *good governance* yakni dengan berdasarkan prinsip partisipasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, aturan hukum, daya tanggap, bekeadilan. Peraturan yang mengatur pajak bumi dan bangunan dari pemerintah kabupaten. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Pagerejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo secara umum sudah mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muh Rizky Ridwan (2017) yang berjudul “ Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah” skripsi ini membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dijalankan dalam perencanaan jangka menengah di kota Makassar. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di kota makassar serta hambatan dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah normative empiris yaitu jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi

kepuustakaan (*literature study*) dan studi lapangan (*field reasech*). Penelitian ini bersifat deskriptif , kemudian datanya akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari keempat prinsip-prinsip *good governance* yang diteliti, prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penerapannyatelah dijalankan secara indikator yang telah ditentukan. Berbeda dengan prisnip akuntabilitas dan partisipasi yang memiliki hambatan dalam penerapannya . prinsip partisipasi dala penerapannya masih memiliki kendala dalam konsep partisipasi yang dilakukan bappeda kota makasar. Partisipasi masyarakat hanya saat musrembang saja. Begitupula dengan prinsip transparansi dalam penerapannya dimana dalam penetapan APBD dikarenakan yang hanya dapat terlibat pemerintah dana anggota DPR saja tetapi tidak melibatkan masyarakat dalam penetapannya.

Dalam pengamatan penulis ada beberapa skripsi tentang prinsip-prinsip *good governance*, sama seperti peneliti lakukan. Namun skripsi tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI) berbeda subjek dan objeknya dari penelitian terdahulu. Peneliti membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Asosiasi Pemerintaha Desa Seluruh Indonesia sedangkan kajian penelitian terdahulu membahas tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan jangka menengah daerah. Peneliti menggunakan studi berbeda dengan kajian penelitian terdahulu, peneliti juga menambahkan materi tentang fiqh siyasah (fiqh siyasah dusturiyah) yaitu pembahasan

tentang kemaslahatan masyarakat hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari lima bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri atas Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori berisi tentang Pengertian Siyash dan Sejarah Siyash. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang terdiri dari Pengertian dan Sejarah serta landasan Hukum. Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) terdiri atas Pengertian, Sejarah dan Prinsip-Prinsip. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan.

Bab III : Gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta meliputi: gambaran umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, asas dan tujuan, sifat dan fungsi APDESI, visi dan misi APDESI, serta struktur organisasi dan susunan kepengurusan.

Bab IV : Analisis penelitian terdiri dari peran APDESI dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, serta analisis

fiqh siyasah terhadap prinsip-prinsip *good governance* pada asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia.

Bab V: Terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir berisi tentang lampiran data/foto bukti wawancara dan daftar Pustaka.



BAB II

LANDASAN TEORI

A.Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti kurang mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*Faqaha*" diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya". Berbeda dari ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah fiqh adalah "ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci". Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karna beraifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencangkup pembahasan tentang hubungan manusia dengan tuhan (ibadahnya), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama

manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), *mura'faat* (hukum acara), siyasah (politik/ ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional). Dari gambaran diatas jelaslah bahwa fiqh siyadah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis dan tetminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata Syariah atau siyasah yang merupakan bentuk Masdar atau kata benda dari kata sasa, yang memiliki banyak sekali makna antara lain mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan memerintah (*sturen*). Seperti penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemalsahatan, dan juga mengatur kehidupan masyarakat Siyasah juga dapet diartikan administrasi dan menejemen¹.

Secara terminologi *siyasah* berarti : Pertama : hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.²

Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat*

61. ¹ Ridwan., *Fiqh Politik. Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. (Jakarta: AMZAH, 2019),

² Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 49.

dan jauh dari *mafsadat*, kendati tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al Qur'an dan as- Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.²⁸ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

Definisi *siyasah* dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang bersifat universal demi terciptanya tujuan masyarakat.³ *siyasah* diartikan sebagai politik dan juga ilmu tata pemerintahan (*statrcraf*)⁴. Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.

Sementara para fuqaha sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan pejabat atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik mengacu pada kemaslahatan

³ Abd al-Rahman Taj, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Pramedia Group Edisi Pertama : 2014), 5-6.

⁴ Kamaruzamman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamental*, (Magelang: Yayasan Indonesiatara Anggota AKAPI, 2001), 29.

melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat siyasah, yaitu:

1. Bahwa siyasah berhubungan dengan kepengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf al-masafid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat islam yang universal.

Berdasarkan hakikat siyasah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah adalah wahyu Al-Quran dan Al- Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karna kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dimanis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan terdapat pada manusia dan lingkungannya itu sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman, dan warisan budaya.

Siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan,

mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan ini ada yang diatur dengan hukum-hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadist-Hadist dan ada yang diatur berdasarkan dari Alquran dan Hadist Nabi dikenal dengan ajaran agama atau politik sekuler.

Siyasah yang didasarkan dari Al-quran dan Hadis disebut dengan Siyasah Syar'iyah, yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara⁵. Siyasah yang tidak ada relevansinya dengan agama dikenal dengan istilah siyasah wadliyyah yaitu siyasah yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah, adat istiadat, masyarakat dan merupakan hasil pemikiran dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara⁶.

Tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut (yang disebut dengan siyasah wadh'iyah) harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Jika bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar'iyah dan tidak boleh diikuti.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi beberapa aspek seperti: pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar

⁵Ibid 62-63

⁶ J. Suyuti Pulungan, Mutoha, *Fiqh Siyasah, Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 20.

warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat *intern* disuatu negara maupun hubungan yang bersifat *ekstern* diantar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan mukallaf dan urusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya⁷.

2. Ruang Lingkup Siyasah

Menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qodha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah idariyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h 30.

meringkaskannya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qodha'iyyah (peradilan), siyasah idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/ kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyah lebih memperkecilnya menjadi tiga bagian bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddienqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
2. Siyasah Tasyriiyyah (Politik Hukum)
3. Siyasah Qodha'iyyah (Politik Peradilan)
4. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara)
6. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah (Politik Hubungan Internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
8. Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat terkait pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) bagian ini meliputi kajian tentang penetapam hukum (tasyri'iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan

(qodha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah) bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dengan negara non-Muslim (al-siyasah al-duali al-amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Apapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.

3. **Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut.⁸ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara

⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahaspengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya⁹.

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.¹⁰

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam

⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003),. 47

¹⁰ *Ibid* 53

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

B. Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

1. Sejarah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

APDESI merupakan wadah berkumpul para Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti di seluruh Indonesia, yang dideklarasikan tanggal 17 Mei 2005 di Jakarta sesuai hasil MUNAS I di Jogjakarta tanggal 23-25 April 2005, dalam hasil munas tersebut terpilih SUWARDJO HENDROWIJOYO, S.Pd., MM dari Kabupaten Cilacap-Jawa Tengah sebagai Ketua Umum, IPIN ARIFIN, S.Sos., MM dari Kabupaten Bandung-Jawa Barat sebagai Sekretaris Jenderal dan JAYUSMAN MUCHTAR dari Kabupaten Tangerang-Banten sebagai Bendahara Umum.

APDESI dibentuk untuk menampung dan menyalurkan aspirasi para Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti, atas dasar kesamaan pandangan dan pemikiran yang sama dalam membangun Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, namun beranekaragaman dalam konteks sosial, budaya, kemampuan moral maupun materiil. APDESI mencoba membangun kebhinekaan itu melalui visi dan misi, Terwujudnya Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa yang Maju, Kuat, Sejahtera, Mandiri dan Demokratis.

Dalam perjalannya APDESI mengalami sebuah kendala internal dalam sebuah ide, pemikiran yang tidak sama dalam tubuh kepengurusan masa bakti 2011-2016, pro dan kontra di dalam tubuh kepengurusan mulai terjadi dari RAKERAS I tahun 2012 di Makasar Sulawesi Selatan, pada

bulan November 2012, muncul mosi tidak percaya pada rapat Koordinasi DPP APDESI dengan para Ketua DPD APDESI Provinsi terhadap Ketua Umum DPP APDESI hasil Munas II yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede-Jakarta dengan Ketua Umum Sindawa Tarang, pada Mei 2013 DPP APDESI menunjuk Ketua Harian DPP APDESI sdr. H. Basri Lubis, September 2013 DPP APDESI membuat SK Penetapan Panitia RAKERNAS II APDESI yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. H. Abd Hadi, SH. M.Mhum.

Pada tanggal 23-24 Maret 2014 di Jogjakarta APDESI melaksanakan RAKERNAS II dengan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menghasilkan beberapa keputusan diantaranya peran Ketua Umum DPP APDESI (Sindawa Tarang) diserahkan ke salah satu Ketua DPP APDESI H. SUHADI MY, S.Sos., MM. Pada tanggal 26-27 Desember 2015 di Solo APDESI kembali menyelenggarakan RAKERNAS III yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan menghasilkan beberapa keputusan salah satunya melaksanakan MUNAS APDESI III APDESI Tahun 2016.

2. Pengertian Asosiasi Pemerintaha Desa Seluruh Indonesia

APDESI merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai peran sebagai penguatan kelembagaan untuk memajukan organisasi dan mensejahterkan anggotanya, melalui penampungan dan penyaluran aspirasinya, mengingat banyaknya jumlah anggota dan tersebaranya di seluruh Indonesia, serta keberadaan pengurus yang berasal dari berbagai budaya dan kemampuan yang beragam, hal ini bagian dari kendala dalam implementasi program kerja kepengurusan.

APDESI memiliki peran sebagai kemitraan dengan pemerintahan dalam rangka mendukung segala bentuk program dan kebijakan untuk kemajuan desa terutama pemerintah desa dan masyarakat desa. Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik perangkat pemerintahan desa maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas perangkat pemerinthan desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat langsung dalam tata kelola desa, seperti pengetahuan terhadap isi Undang-Undang Desa dan implentasinya, menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, menumbuh kembangkan semangat bekerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa tersirat bahwa peran dan fungsi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sangat dominan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang didukung pula oleh Peraturan Presiden No. 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, yang menitikberatkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Fasilitas Penataan Desa, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahana Desa, Pengelolaa Keuangan Dan Asset Desa, Produk Hukum Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Penugasan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Desa, Kerjasama Pemerintahan Desa, serta evaluasi perkembangan Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Dipandang perlu APDESI sangat mendukung sekali atas semua program-program oleh kedua Kementerian ini, semoga kemitraan ini dibangun untuk mempercepat program-program penikatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam penataan kelola desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam rangka optimalisasi organisasi DPP APDESI masa bakti 2016-2021 berupaya untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi organisasi yaitu sebagai sarana koordinasi, komunikasi, advokasi, dan fasilitasi dengan pengurus serta anggotanya; dan sarana kemitraan yaitu menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

3. Dasar Hukum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa tersirat bahwa peran dan fungsi Kementerian Dalam Negeri RI sangat dominan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang didukung pula oleh Peraturan Presiden No. 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam

Negeri, yang menitikberatkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Fasilitas Penataan Desa, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengelola Keuangan Dan Asset Desa, Produk Hukum Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Penugasan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Desa, Kerjasama Pemerintahan Desa, serta evaluasi perkembangan Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara¹¹.

C. Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

1. Pengertian *Good Governance*

Good Governance diartikan sebagai penyelenggara Pemerintahan yang baik, *good governance* merupakan dasar, syarat landasan untuk mengelola lingkungan yang baik. Dikatakan baku sebab *good governance*, mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dilihat lebih jauh bahwa perangkat kelembagaan itu mencakup adanya birokrasi yang bersih dan efisien, adanya Legislatif

¹¹ Hasil Musyawarah Nasional Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia.(Jakarta:2016) 6.

yang inspiratif dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat serta menjadi *control* yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintah.

Arti *Good* dalam *Good Governance* mengandung dua pengertian, yang pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak/keinginan masyarakat yang dalam penacapaian tujuanya sebagai pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi pertama mengenai demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya seperti: *Legitimacy* (Apakah Pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability* (Akuntabilitas), *securing of human rights*, *autonomy and devaluation of power*, dan *assurance if civilian control*. Sedangkan orientasi tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif secara efektif dan efisien.

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang *Good Governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *Good Governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *Good Governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga

Adanya sistem penegakan hukum yang dapat dipercaya termasuk didalamnya aparat penegak hukum yang dapat dipercaya termasuk didalamnya. Aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang baik, serta adanya masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga serta mengontrol Lembaga pemerintahan. Termasuk didalamnya adanya distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol secara konstruktif¹².

Good Governance merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama dalam menyelenggaraan pemerintahan di anggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, maka daripada itu dalam sebuah perubahan ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respon positif dari pemerintah. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum, pemerintahan yang seperti ini juga

¹² Citra Fiyri Kartika, Imam Hanafi, Hermawan, Good Environmental Governance. (Malang: UB Press,2012), 11.

sebagai pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Definisi *Good Governance* sebagai berikut:

- a. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*¹³.
- b. *Good Governance* menurut Pandji Santoso juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.
- c. Menurut Bob Sugeng Hadiwiyata bahwa asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antar sektor pemerintahan (menyediakan perangkat aturan kebijakan), sektor bisnis, (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor *civil society*.

2. Sejarah Kemunculan Konsep *Good Governance*

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literarture administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperknalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Penggunaan istilah *Governance* sebagai konsep berbeda dengan Goverent, mulai di popularkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam laporannya yang sangat terkenal yang berjudul “ Sub-Suهران *Africa: From Crisis Political Power to Manage Nation*”. Selanjutnya, laporan ini menekankan bahwa legimitasi politik dan konsensus

¹³ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Akutansi dan Good Governance, (Jakarta: LAN dan BPKP. 200). 17.

merupakan persyaratan bagi pembangunan berkelanjutan Aktor Negara (Pemerintah), bisnis dan *Civil Society* harus bersinergi untuk membangun *consensus*, dan peran negara tidak boleh lagi bersifat regulatif, tetapi sebatas hanya fasilitatif.

Tetapi selama itu *Governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan Lembaga Pendidikan yang tinggi. Wacana tentang *governance* ini baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan, terutama setelah berbagai Lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya. Proses pemahaman umum mengenai *good public governance* atau tata pemerintahan yang baik mulai mengemuka di negara Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi antara Pemerintahan Indonesia dan Negara Luar dan beserta Lembaga-Lembaga bantuan yang menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan sosial politik Indonesia.

Good governance pernah sangat populer dan berenergi pada tahun 1998-1999, tetapi pada kenyataannya tidak berusia Panjang, dan kemudian tidak banyak lagi yang digunakan. Namun *good governance* bisa tetap bertahan hingga sekarang, dan seakan-akan menjadi symbol dari masuknya Indonesia dalam standar kehidupan global.

Menurut Suyanto dalam Salam, ada tiga hal yang melatarbelakangi munculnya *Good Governance*, yaitu:

1. Munculnya fenomena “gelombang demokratisasi berskala global”, gelombang ini pada mulanya muncul di Korea Selatan dan beberapa

Negara Amerika Latin yang menenggelamkan politik birokratis otoriter pada dasawarsa tahun 80-an dan berikutnya menyapu bersih sosialisme di Eropa pada awal dasawarsa tahun 90-an.

2. Terjadi kehancuran secara sistematis berbagai dasar institusional bagi proses pengelolaan distribusi sumber-sumber ekonomi pada Sebagian besar masyarakat dunia ketiga institusi bisnis politik tersebut yang seharusnya memiliki prinsip pengelolaan berbeda telah berubah menjadi sekutu dan melipat gandakan tumbukan kronisme Transparansi, akuntabilitas publik dan lokasi berbagai sumber ekonomi gagal berkembang dalam dunia bisnis.
3. Terakumulasinya kegagalan Struktural *Adjustment* program yang diprakarsai oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi dasar bahwa Negara merupakan satu-satunya Lembaga penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi.

Oleh karena itu teoritis administratif negara Indonesia paling berbeda dan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada sebagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep *government* berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas negara.

Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam

konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, dan transparan, *rule of law*, partisipasi dan kemitraan.¹⁴

Kemudian secara implisit kata *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian: pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Konsep *good governance* menjadi sangat populer dan sekarang diakui sebagai manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program *governance*, yang mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, kebebasan pers, penghormatan pada hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan warga negara dalam rangka pembangunan. Program *governance* memusatkan perhatian pada reduksi besaran organisasi birokrasi pemerintah, privatisasi badan milik negara dan perbaikan administrasi keuangan.

Konsep *good governance*, yang dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka membangun relasi negara-masyarakat-pasar yang baik. Beberapa pendapat malah tidak setuju dengan konsep *good governance* karena dinilai terlalu bermuatan nilai-nilai ideologis.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *good governance* tersebut, maka dipahami bahwa *good governance* memiliki keterkaitan konsep antara konsep *governance* dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁴ Sofian Efendi. Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance Lokakarya Reformasi Birokrasi (Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, 2005). 2.

Keterkaitan konsep tersebut belum menjadi bagian teoritik konsep negara hukum (*rechstaat*), akan tetapi memiliki benang merah bahwa kedua konsep tersebut akan digunakan untuk menemukan konsep-konsep baru tipologi negara hukum yang mendapatkan prinsip-prinsip *good governance* bukan saja Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik.

3. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak¹⁵.

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi *governance* dengan pola pemerintahan yang konvensional terletak pada tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat transparan, berkeadilan, bersih, akuntabel, serta berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa. *United Nations Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu

¹⁵ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja (Vol 45. No. 01 Mei:2019) 49.

menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu sembilan prinsip dasar, yaitu:

Prinsip-Prinsip Good Governance.

1. Partisipasi (*Participation*) yaitu, setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi.

2. Aturan hukum (*Rule of Law*) yaitu, kerangka peraturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal

penciptaan *Good Governance* adalah menghubungkan sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).

3. Transparansi (*Transparancy*) yaitu, transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Salah satu karakteristik *Good Governance* adalah keterbukaan Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan , penggunaan dana-dana public, sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya tanggap (*Resvonsiveness*) yaitu, setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan , setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham. Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama di tujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan oleh sektor publik, secara periodik perlu di lakukan suvei untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen.

5. Berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*) yaitu, pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktifitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan *consensus*. Dalam *Good Governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan *consensus*, yang di lanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah di putuskan bersama. *Consensus* bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukan lah hal yang abaru, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat.

6. Berkeadilan (*Equity*) yaitu, pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectivinnes and Effeciency*) yaitu, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yangt tersedia.

8. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu, para pngambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*Stakeholders*).¹⁶ Setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya di berikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (*stake holder*), yaitu masyarakat luas, secara teoritis, akuntabilitas dapat di bedakan menjadi lima macam, yaitu:

- 
- a. Akuntabilitas organisasi
 - b. Akuntabilitas legal
 - c. Akuntabilitas politik
 - d. Akuntabilita professional
 - e. Akuntabilitas moral

¹⁶ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akutansi (Vol. 13 No. 2 Juli 2019). 160.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- Acmadi, dkk. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Tranparansi Indonesia*. Jakarta, 2002.
- Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan , 1991
- Abd al-Rahman Taj, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta : Pramedia Group Edisi Pertama : 2014
- Al-Quran Terjemahan*, Departemen Agama RI, Bandung, CV Darus Sunnah.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.
- Burhan Ashhafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta, 2013.
- Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta., Prenada Media Group, 2014.
- Joni Emirzon. *Prinsip-Prinsip Good Governance*, Yogyakarta. Genta Press, 2007.
- J. Suyuti Pulungan, Mutoha, *Fiqh Siyasah, Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- Nuryadi & Tolib, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Klaten, Intan Pariwara, Edisi Revisi 2017.

Prof. Dr. ir. Rizald Max Rompas, M.Agr, Drs. Tomo HS, M.Si, Ir Dasril Munir, MM, *Kreasi Good Governance Suatu Eksiterik Mutlak*, Jakarta Pusat, Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, 2010.

Ridwan., *Fiqh Politik. Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. (Jakarta: AMZAH, 2019)

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013)

Sedarmayanti, Syaiful Hidayat, *Metodologi penelitian*, Bandung, Mandar Maju. 2002.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efesien Melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*. Bandung, CV.Mandar Maju, 2007.

Sofian Efendi. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance Lokakarya Reformasi Birokrasi*, Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta, 2005.

Suharsini Arikunto., *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, Jakarta, PT Rienekan Cipta, 2014.

Sukardi, *Metode Penelitian Suatu Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.*, Jakarta. PT. Bumi Aksara, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010.

Tim Studi AKIP, *Good Governance*, Jakarta, 2003.

Yudi Latif dkk, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina), 2005.

Jurnal

Anggaran Dasar Rumah Tangga Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia.
2005

Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam(Pendekatan Ushul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol 6, No 1, Juni 2015.

Proposal Permohonan Bantuan Operasional Organisasi DPC APDESI Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019.

Lembaga Administrasi Negara, *Good Governance*, Jakarta. 2011.

Kamaruzamman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Yayasan Indonesiatera Anggota AKAPI, 2001

Yulian Prabowo. *Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (studi Keluarahan Way Dadi Baru)*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2017)

<https://kbbi.web.id/tinjau.html>

<https://Id.m.wikipedia.org>